

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang Program Pengembangan Kecamatan dalam meningkatkan peranan pemerintah desa dan lembaga desa, khususnya di Kecamatan Kokap dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. PPK mampu meningkatkan peranan pemerintah desa dan lembaga desa. Tahapan-tahapan kegiatan PPK yang banyak dan terkesan berbelit-belit mau tidak mau harus diikuti oleh pemerintah desa dan lembaga desa terkait, karena kalau tidak mau mengikuti akibatnya akan kalah dalam kompetisi bahkan bisa dibatalkan kepesertaannya dalam kegiatan PPK. Dana yang disalurkan lewat PPK cukup besar, mampu membantu pembangunan sarana prasarana fisik yang sangat dibutuhkan masyarakat, misalnya pembangunan jalan, jembatan, gedung TK dan lain-lain. PPK mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemerintah desa dalam pembangunan, juga mampu memancing swadaya masyarakat. Tahapan-tahapan kegiatan PPK dan pendampingan oleh fasilitator mendidik masyarakat dan pelaku PPK tingkat desa untuk mengelola suatu kegiatan mulai dari perencanaan hingga pelestarian.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi PPK dalam meningkatkan peran pemerintah desa dan lembaga desa meliputi sumber daya manusia, prosedur dan sarana prasarana serta pembiayaan.

Dari segi sumber daya manusianya, adanya sikap pesimis sehingga tidak semangat mengikuti tahapan PPK, selain itu adanya sikap kurang sportif dalam bermusyawarah maupun dalam menerima hasil musyawarah sehingga menimbulkan konflik sosial.

Dari segi prosedur, tahapan PPK yang panjang terkadang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu. Dana pembangunan sarana prasarana fisik turun pada musim penghujan sehingga pelaksanaannya banyak mengalami kesulitan.

Dari segi pembiayaan dan sarana prasarana, kemampuan swadaya dari kelompok masyarakat tidak sama. Sehingga ada kelompok masyarakat yang sebenarnya sangat membutuhkan pedanaan kegiatan, namun karena kalah dalam kompetisi yang salah satunya adalah kesanggupan swadaya, akhirnya tidak bias terdanai. Selain itu ada kelompok masyarakat yang terlalu berani menyanggupi swadaya, sehingga keberatan dalam merealisikannya dan menyulitkan pelaksanaan kegiatan.

B. Saran

1. Proses tahapan-tahapan PPK yang lama dan seolah-olah berbelit-belit tidak perlu dipangkas atau disederhanakan, karena dalam setiap tahapan tersebut terjadi proses pemberdayaan masyarakat, lembaga desa dan pemerintah desa.
2. Prinsip kompetisi penuh dan tanggung renteng harus disikapi dan diantisipasi oleh pemerintah desa dan lembaga desa agar tidak menimbulkan konflik sosial.